

Kesiapan Regulasi Pemerintah dalam Implementasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur Metropolitan Rebana

Widya Nissa Wildani*, Asnita Frida Sebayang

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*widyadetaa@gmail.com, fridasnita@gmail.com

Abstract. Rebana Metropolitan Area is projected to become an integrated industrial area through the development of urban-rural industrial area connectivity to improve better socio-economic conditions. There will be 81 priority projects for Metropolitan Rebana development, to realize this development alternative non-APBN financing is needed. One of the financing alternatives is PPP, seeing that there is a gap between the availability of the government sector's budget and the number of projects that must be realized. Implementing the PPP financing scheme, requires readiness from the government sector, especially readiness in regulations. Regulation is an important matter, as the basis for PPP implementation must be considered in detail and the need for conformity with development needs to attract investors to contribute to the provision of national infrastructure through the PPP scheme. This study uses the Community Readiness Model (CRM) from (Tri-Ethnic for Prevention Research). Furthermore, using SWOT to find out the strategy for successful PPP implementation in the Metropolitan Rebana infrastructure project. The results of the study show that the readiness level of the readiness stage is at the initiation stage with a score of 6.2. This stage means that the government sector has prepared and allocated and implemented things for the successful implementation of the PPP scheme, and the SWOT strategy shows the result that internal factors and external factors of strengths (S) and opportunities (O) have a higher score or value compared to weakness (W) and threat (T) factors.

Keywords: *Government Cooperation with Business Entities, Regulatory Readiness, Metropolitan Rebana.*

Abstrak. Wilayah Metropolitan Rebana yang diproyeksikan menjadi kawasan industri terintegrasi melalui pengembangan konektivitas kawasan industri perkotaan-perdesaan untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik. Pembangunan Metropolitan Rebana akan terdapat 81 proyek prioritas, tentunya untuk mewujudkan pembangunan tersebut diperlukannya alternatif pembiayaan non APBN. Salah satu alternatif pembiayaan adalah KPBU, melihat terdapat gap antara ketersediaan anggaran yang dimiliki sektor pemerintah dengan banyaknya proyek yang harus direalisasikan. Dalam mengimplementasikan skema pembiayaan KPBU diperlukannya kesiapan dari sektor pemerintah, terutama kesiapan dalam regulasi. Regulasi merupakan hal penting, sebagai dasar dari pelaksanaan KPBU yang harus diperhatikan secara mendetail dan perlunya kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan untuk menarik minat investor agar berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur nasional melalui skema KPBU. Penelitian ini menggunakan Community Readiness Model (CRM) dari (Tri-Ethnic for Prevention Research). Selanjutnya, menggunakan SWOT untuk mengetahui strategi keberhasilan implementasi KPBU pada proyek infrastruktur Metropolitan Rebana. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapan readiness stage berada pada tahap initiation dengan skor 6,2. Tahapan ini mengartikan bahwa sektor pemerintah sudah mempersiapkan dan mengalokasikan dan melaksanakan sesuatu hal untuk keberhasilan implemtasi skema KPBU, serta strategi SWOT menunjukkan hasil bahwa faktor internal dan faktor eksternal dari kekuatan (S) dan peluang (O) memiliki skor atau nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor kelemahan (W) dan ancaman (T).

Kata Kunci: *Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Kesiapan Regulasi, Metropolitan Rebana.*

A. Pendahuluan

Pemerintah daerah Jawa Barat, yaitu bersinergi untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan mengembangkan sektor potensial dari setiap daerah (Sandi, 2020). Saat ini pembangunan Jawa Barat menitik beratkan pada aglomerasi perkotaan atau Metropolitan Area yang mencakup tujuh daerah, yaitu: Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kuningan yang beraglomerasi menjadi Kawasan Metropolitan Rebana dengan jumlah penduduk 18,82 persen dari total penduduk Jawa Barat. Kawasan tersebut nantinya akan menjadi metropolitan ketiga di Jawa Barat untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan transformasi sosial.

Industri umumnya beraglomerasi di suatu wilayah yang mampu memenuhi kebutuhan produksi dan memberikan kemudahan, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan *output*. Dengan begitu satu faktor yang membuat peranan industri di suatu wilayah menjadi berkembang secara cepat (Aprianoor & Muktiali, 2015). Namun aglomerasi di Jawa Barat masih berfokus di kota-kota besar saja, sehingga terciptanya kesenjangan pendapatan yang cukup besar antar daerah Jawa Barat. Melalui aglomerasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan menciptakan konsentersasi industri yang berkelanjutan dan efektif, sehingga terciptanya peningkatan ekonomi daerah di Kawasan Metropolitan Rebana.

Nantinya dalam pembangunan Kawasan Metropolitan Rebana akan terdapat 81 proyek prioritas terhadap pengembangan industri yang dapat membangkitkan ekonomi masyarakat baik skala mikro maupun makro, dan diprediksi akan menjadi motor baru penggerak pertumbuhan ekonomi dengan rencana capaian pengembangan kawasan segitiga emas Cirebon – Patimban – Kertajati sebagai super KEK (Sarasa, 2021). Dapat dikatakan urgensi dari pembangunan Metropolitan Rebana adalah meningkatkan daya saing yang memberikan dampak baik terhadap sosial-ekonomi dan mendukung instrument pembangunan nasional.

Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur Metropolitan Rebana cukup besar, sedangkan pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pembangunan, dengan begitu pemerintah perlu menggunakan alternatif pembiayaan selain dari APBN/APBD. Salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menutupi *funding gap* adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan mengajak sektor badan usaha berpartisipasi dalam membangun kemajuan daerah melalui pembiayaan KPBU (Susanto, 2022).

Namun, hingga saat ini dalam implementasi skema pembiayaan KPBU pada proyek pembangunan infrastruktur daerah, masih banyak permasalahan yang dialami sektor pemerintah maupun badan usaha (Suhendra, 2017). Permasalahan tersebut mempengaruhi keterlibatan pihak badan usaha dalam pembiayaan KPBU, sehingga lagi-lagi pembangunan mengandalkan sekama konvensional melalui APBN/APBD. Salah satu permasalahan yang menghambat KPBU adalah perizinan lahan dan regulasi yang masih belum sinkron antara pusat dan daerah, adanya benturan berbagai peraturan menimbulkan kebingungan manakan regulasi yang akan menjadi acuan, dan menimbulkan inefisien (Rifai, 2016).

Upaya untuk mendukung implementasi KPBU tentunya dibutuhkan kesiapan regulasi atau peraturan yang sesuai dan mencakup segala aspek yang dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakuakn untuk mencapai keberhasilan implementasi KPBU dibutuhkannya kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan kesiapan pemerintah untuk memastikan pembangunan dapat terlaksana dengan baik (Mudiparwanto & Gunawan, 2022). Hal tersebut menyangkut dengan kesiapan regulasi pemerintah untuk terlaksananya KPBU dan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran untuk mendorong minat investor melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur di Kawasan Metropolitan Rebana. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan regulasi pemerintah dalam implementasi KPBU pada pembangunan kawasan Metropolitan Rebana?
2. Dimensi kesiapan apakah yang paling dominan bagi sektor pemerintah dalam implementasi KPBU pada pembangunan kawasan Metropolitan Rebana?

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 12 Bandung yang berjumlah 1.023 siswa.

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu Proposional Stratified Sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 91 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial.

Variabel Penelitian

Dalam melakukan analisis terhadap kesiapan, maka penelitian ini menggunakan metode analisis *The Community Readiness Model (CRM)*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima dimensi yang meliputi usaha masyarakat, pengetahuan masyarakat, kepemimpinan, kondisi masyarakat, dan sumber daya. Cara melakukan penilai CRM adalah dengan menggunakan lima dimensi dan dari setiap dimenasinya memiliki Sembilan tahapan kesiapan (Kelly et al., 2003).

Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah identifikasi kesiapan berdasarkan pendapat responden kunci menggunakan penilaian CRM dan skala pengukuran menggunakan *skala likert*. Langkah-langkah perhitungan skor dilakukan dengan:

1. Setelah dilakukan skoring oleh masing-masing responden, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk setiap dimenasi dengan membagi total nilai setiap dimenasi dengan jumlah responden.
2. Nilai total kesiapan diperoleh dengan menjumlahkan skor setiap dimenasi, kemudian dibagi dengan banyaknya dimenasi.

Penentuan tingkat kesiapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Penentuan Tingkat Kesiapan Masyarakat

No	<i>Readiness Stage</i>	<i>Range</i>
1	<i>No Awareness</i>	1.0 – 1.9
2	<i>Denial/Resistance</i>	2.0 – 2.9
3	<i>Vague Awareness</i>	3.0 – 3.9
4	<i>Preplanning</i>	4.0 – 4.9
5	<i>Preparation</i>	5.0 – 5.9
6	<i>Initiation</i>	6.0 – 6.9
7	<i>Stabilization</i>	7.0 – 7.9
8	<i>Confirmation/Expansion</i>	8.0 – 8.9
9	<i>High Quality of Community Ownership</i>	9.0 – 9.9

Sumber: Febriyanti (2015)

Analisis SWOT

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal atau melakukan analisis SWOT (*Strengths, opportunities, weaknesses, treaths*) dengan dilakukannya analisis tersebut diharapkan akan menghasilkan suatu keputusan bentuk strategi suatu yang tepat, agar setiap pengambilan keputusan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam melakukan analisis SWOT akan menggunakan logika yang mampu memaksimalkan dari setiap faktor kekuatan (*strengths, opportunities*) serta dapat meminimalisir dari faktor kelemahan (*weakness, treaths*).

Matriks IFAS (Internal Strategic Factors Sumaary) dan EFAS (External Strategic Factors Summary)

Matriks ini dibuat untuk ditujukan kepada organisasi atau perusahaan dalam mengetahui lingkungan secara *internal* dan *eksternal* yang berasal dari angka untuk menggambarkan kondisi suatu organisasi atau perusahaan terhadap lingkungannya, baik lingkungan *internal* maupun

eksternal (Arkhamo, 2021). Dengan menggunakan skala pengukuran *skala likert* skala 1-5, peringkat = 1 (Sangat Tidak Baik), peringkat = 2 (Tidak Baik), peringkat = 3 (Cukup Baik), peringkat = 4 (Setuju), peringkat = 5 (Sangat Setuju). Kelemahan utama berada pada peringkat = 1 dan kekuatan utama berada pada peringkat = 5.

1. Faktor Internal: (Kekuatan-kelemahan) = Sumbu Y Horizontal
2. Faktor Eksternal: (Kekuatan-kelemahan) = Sumbu X Horizontal

Tahapan yang dilakukan selanjutnya merupakan analisis faktor internal dan eksternal dalam memperoleh hasil dari kekuatan dan kelemahan pada faktor internal. Serta peluang dan ancaman pada faktor eksternal. Dengan begitu akan diketahui kelemahan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari masing-masing faktor dan proses analisis SWOT dapat dilakukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam proses mengukur tingkat kesiapan dari para responden kunci yang terdiri dari lima dimensi kesiapan sesuai dengan *Community Readiness Model* dari *Tri Ethic for Prevention Centre* (2014), yaitu pengetahuan umum tentang isu, kepemimpinan, iklim masyarakat, upaya pengetahuan tentang isu, dan sumber daya, maka dapat diketahui *readiness stage* atau tingkat kesiapan dari sektor pemerintah, yakni memiliki skor rata-rata 6,2 atau berada pada tahap *initiation*, setelah didapati hasil pengisian kuesioner oleh responden kunci dan dilakukan analisis menggunakan *Community Readiness Model*. Hasil pengelolaan data untuk memperoleh tingkat kesiapan dari setiap dimensi dan didapati hasil perhitungan rata-rata dari skor keseluruhan dengan jumlah dimensi kesiapan, yaitu:

Tabel 3. Perhitungan Kesiapan Masyarakat

Dimensi	Skor	Readiness Stage	Angka Ideal	Selisih Angka Ideal
Pengetahuan Masyarakat Tentang Isu	6,6	<i>Initiation</i>		2,4
Kepemimpinan	5,2	<i>Preparation</i>		3,8
Iklim Masyarakat	5,8	<i>Preparation</i>		3,2
Upaya Pengetahuan Masyarakat	6,2	<i>Initiation</i>	9	2,8
Sumber Daya	7,0	<i>Stabilization</i>		2,0
Total		30,8		-
Rata-rata	6,2	<i>Initiation</i>		3,8

Sumber: Hasil olah data, 2022.

Tingkat kesiapan sektor pemerintah berada pada tahapan *initiation* dengan total skor rata-rata keseluruhan yakni sebesar 6,2. Berdasarkan data dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan, dimana sektor pemerintah sudah mempersiapkan dan mengalokasikan dan melaksanakan sesuatu hal untuk melakukan pemanfaatan skema pembiayaan KPBU pada pembangunan infrastruktur.

Dimensi Upaya Pengetahuan Umum

Tabel 4. Dimensi Upaya Pengetahuan Umum

No	Responden	Penilaian	Total
1.	Responden 1	7	
2.	Responden 2	9	
3.	Responden 3	4	6,6
4.	Responden 4	7	
5.	Responden 5	6	

Sumber: Hasil olah data, 2022.

Dimensi kesiapan upaya pengetahuan umum kesiapan regulasi dalam implementasi skema KPBU pada pembangunan infrastruktur, yakni sebesar 6,6. Angka tersebut menunjukkan tingkat kesiapan atau *readiness stage* berada pada tahap *initiation*, dimana pada tahap ini sektor pemerintah yang pernah mendengar tentang KPBU, tujuan, dan peluang usaha dalam pemanfaatan infrastruktur.

Dimensi Kepemimpinan

Tabel 5. Dimensi Kepemimpinan

No	Responden	Penilaian	Total
1.	Responden 1	5	
2.	Responden 2	9	
3.	Responden 3	2	5,2
4.	Responden 4	5	
5.	Responden 5	5	

Sumber: Hasil olah data.

Dimensi kepemimpinan kesiapan regulasi dalam implementasi skema KPBU pada pembangunan infrastruktur, yakni sebesar 5,2. Angka tersebut menunjukkan tingkat kesiapan atau *readiness stage* berada pada tahapan *preparation*.

Dimensi Iklim Masyarakat

Tabel 6. Demensi Iklim Masyarakat

No	Responden	Penilaian	Total
1.	Responden 1	5	
2.	Responden 2	9	5,8
3.	Responden 3	4	

4.	Responden 4	5
5.	Responden 5	6

Sumber: Hasil olah data.

Dimensi kesiapan iklim masyarakat kesiapan regulasi dari sektor dalam implementasi skema KPBU pada pembangunan infrastruktur, yakni sebesar 5,8. Angka tersebut menunjukkan tingkat kesiapan atau *readiness stage* berada pada tahapan *preparation*.

Dimensi Pengetahuan Umum

Tabel 7. Dimensi Pengetahuan Umum

No	Responden	Penilaian	Total
1.	Responden 1	7	
2.	Responden 2	9	
3.	Responden 3	6	6,2
4.	Responden 4	5	
5.	Responden 5	4	

Sumber: Hasil olah data.

Dimensi kesiapan pengetahuan umum kesiapan regulasi dalam implementasi skema KPBU pada pembangunan infrastruktur, yakni sebesar 6,2. Angka tersebut menunjukkan tingkat kesiapan atau *readiness stage* berada pada tahap *initiation*.

Dimensi Sumber Daya

Tabel 8. Sumber Daya

No	Responden	Penilaian	Total
1.	Responden 1	7	
2.	Responden 2	8	
3.	Responden 3	7	7
4.	Responden 4	7	
5.	Responden 5	6	

Sumber: Hasil olah data.

Dimensi kesiapan sumber daya kesiapan regulasi dalam implementasi skema KPBU pada pembangunan infrastruktur, yakni sebesar 7,0. Angka tersebut menunjukkan tingkat kesiapan atau *readiness stage* berada pada tahap *stabilization*.

Analisis SWOT

Analisis IFAS (Internal Strategic Factors Summary) diperoleh hasil dari perhitungan bobot (B) x Rating (R) dan memperoleh hasil sebagai berikut;

Tabel 9. Faktor Internal (Strengths and Weakness)

No.	Bobot (B)	Rating (R)	Skor (BxR)
A. Kekuatan			
1.	0,08	3,2	0,256
2.	0,08	3,2	0,256
3.	0,07	2,8	0,196
4.	0,09	3,4	0,289
5.	0,10	4	0,4
6.	0,09	3,4	0,289
7.	0,08	3,2	0,25
8.	0,09	3,6	0,32
Nilai	0,67		2,266
B. Kelemahan			
1.	0,07	3	0,24
2.	0,06	3,4	0,31
3.	0,06	2,6	0,18
4.	0,06	2,8	0,21
5.	0,07	3	0,24
Nilai	0,33		0,874
	1,00		3,14

Sumber: Data Hasil Diolah, 2022.

Berdasarkan nilai yang diperoleh, terdapat dua faktor penilaian yaitu faktor *internal* dan *eksternal*. Faktor *internal* terdapat kekuatan utama (S) dalam kesiapan implementasi skema pembiayaan KPBU. Adanya kepastian hukum bagi para investor atau badan usaha yang akan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam penyediaan infrastruktur nasional. Serta adanya kolaborasi antara pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat/daerah, badan usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam implementasi KPBU, dengan masing-masing memperoleh skor sebesar 0,118 dan 0,108. Kelemahan (W) utama adalah terjadinya pembangunan yang gagal/tidak berlanjut karena adanya ketidaksesuaian regulasi antara regulasi pusat dengan daerah, dan badan usaha dengan skor 0,310.

Pada analisis EFAS (External Strategic Factors Summary) diperoleh hasil dari perhitungan bobot (B) x Rating (R) dan memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 11. Faktor Eksternal (Opportunities and Threats)

No.	Bobot (B)	Rating (R)	Skor (BxR)
A. Peluang			
1.	0,097	3,6	0,348
2.	0,118	4,4	0,52
3.	0,091	3,4	0,311
4.	0,091	3,4	0,311
5.	0,108	4	0,43
6.	0,097	3,6	0,348
Nilai	0,602		2,268
B. Ancaman			
1.	0,081	3	0,242
2.	0,091	3,4	0,311
3.	0,07	2,6	0,182
4.	0,075	2,8	0,211
5.	0,081	3	0,242
Nilai	0,398		1,188
	1,00		3,456

Sumber: Data Hasil Diolah, 2022.

Berdasarkan nilai yang diperoleh, terdapat dua faktor penilaian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor eksternal terdapat peluang (O). Tersedianya akan kebutuhan infrastruktur yang mampu memberikan eksternalitas positif terhadap pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dengan skor 0,4. Berdasarkan nilai yang diperoleh, terdapat dua faktor penilaian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor eksternal terdapat faktor eksternal ancaman (T). Kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya pada proyek pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan KPBU dan persepsi masyarakat sekitar yang kurang baik terhadap peran serta swasta di sektor infrastruktur dengan skor 0,196.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Menurut hasil readiness stage kesiapan sektor pemerintah yang memiliki dimensi dengan skor tertinggi yakni dimensi Sumber Daya dengan skor sebesar 7,0 atau berada pada tahap (readiness stage) yakni stabilization. Selain itu kesiapan Pengetahuan Masyarakat

tentang Isu dan dimensi Upaya Pengetahuan Masyarakat, masing-masing dengan skor 6,6 atau berada pada tahap (readiness stage) yakni initiation dan 6,2 atau berada pada tahap (readiness stage) initiation. Sementara itu, dimensi kesiapan terendah adalah dimensi Kepemimpinan dan dengan skor sebesar 5,2 dan 5,8 atau berada pada tahap readiness stage yakni preparation. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa kesiapan sektor pemerintah berada pada skor 6,2 atau berada pada tahap readiness stage yakni initiation tahap initiation memiliki arti bahwa sektor pemerintah sudah mengakui dan mulai memahami terkait implementasi skema KPBU dan melaksanakan serta turut andil dalam proses dengan seluruh pemangku kepentingan untuk keberhasilan implementasi skema KPBU.

2. Menurut hasil penelitian menggunakan analisis SWOT terkait kesiapan sektor pemerintah, strategi pengembangan menggunakan SWOT kuantitatif, menunjukkan hasil bahwa faktor internal dan eksternal dari kekuatan (S) dan peluang (O) memiliki skor atau nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor internal dan eksternal dari kelemahan (W) dan ancaman (T). Dengan begitu terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara lembaga dalam pelaksanaan KPBU, meningkatkan penyesuaian kebutuhan akan regulasi yang membahas KPBU, dan meningkatkan sumber daya manusia.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, dosen pembimbing, dosen program studi Ekonomi Pembangunan FEB Unisba, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan, doa dan semangatnya.

Daftar Pustaka

- [1] Aprianoor, P., & Muktiali, M. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. . *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4, 484–498.
- [2] Kelly, K. J., Edwards, R. W., Comello, M. L. G., Slater, M. D., Thurman, P. J., & Plested, B. A. (2003). Model Kesiapan Komunitas: Pendekatan pelengkap untuk sosial pemasaran. *Marketing Theory*, 3(4), 411–426.
- [3] Mudiparwanto, W. Adi., & Gunawan, A. (2022). URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR. *Diversi Jurnal Hukum*, 8(1), 111–138.
- [4] Rifai, B. (2016). Kendala Implementasi Ppp Kelistrikan dan Kebutuhan Perbaikan Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 24, 51–66.
- [5] Sandi, Ferry. (2020, November 18). Metropolitan Rebanda Punya 13 Kawasan Kota Baru, Ini Lokasinya. *CNBC Indonesia*.
- [6] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- [7] Sarasa, A. B. (2021, August 28). Perpres Rebanda Terbit, Ridwan Kamil: Jabar Akselerasi 81 Proyek Rp 234 Triliun. *Sindonews.Com*.
- [8] Suhendra, M. (2017). Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 41–46.
- [9] Susanto, V. Yhulia. (2022, May 12). Ini Rencana Pengembangan Kawasan Rebanda dan Jabar Selatan. *Kontan.Co.Id*.
- [10] Salsabila,Alsa (2022). *Strategi Bertahan Pelaku Usaha Kecil Tahu Cibuntu Kota Bandung pada Tahun 2017-2021*. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2(1). 31-36.